



Faktor Penghambat Sekolah Inklusi di Lembaga PAUD

Ertika Nur Laily ✉, Universitas PGRI Madiun

Rosyida Nurul Anwar, Universitas PGRI Madiun

Hermawati Dwi Susari, Universitas PGRI Madiun

✉ ertika_2102102003@mhs.unipma.ac.id

Abstrak: Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan suatu metode pengembangan yang ditujukan untuk anak dari lahir hingga berusia enam tahun. Proses ini dilakukan dengan memberikan stimulasi pendidikan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental anak, sehingga mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan yang menghargai keberagaman anak dan memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang paling cocok dengan kebutuhan mereka, bersama dengan teman-teman yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusi di lembaga PAUD sangat penting karena masa PAUD merupakan fase kritis dalam perkembangan anak, di mana stimulasi yang tepat dapat memaksimalkan potensi mereka dan membangun fondasi untuk pendidikan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan sekolah inklusi pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah termasuk buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi membaca, mempelajari, review sekunder dari jurnal ilmiah, artikel serta berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor penghambat yang mempengaruhi penyelenggaraan sekolah inklusi di tingkat PAUD, yaitu ketidakmampuan institusi pendidikan untuk beradaptasi, jumlah tenaga pengajar yang tidak mencukupi, terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), kekurangan akses bagi siswa berkebutuhan khusus, dan rendahnya partisipasi komunitas sekolah serta masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan tantangan kompleks yang menghambat efektivitas pendidikan inklusi. Kurangnya adaptasi kurikulum dan sistem penilaian, rasio guru-murid yang tidak ideal, minimnya ketersediaan GPK terlatih, keterbatasan akses fisik dan materi pembelajaran adaptif, serta stigma masyarakat menjadi poin krusial.

Kata kunci: Pendidikan Inklusi, PAUD, Hambatan, Guru Pembimbing Khusus.



PENDAHULUAN

Pendidikan bagi anak usia dini adalah suatu usaha pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir sehingga mereka berusia enam tahun. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 mengenai system Pendidikan nasional tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini merupakan usaha untuk memberikan dorongan, bimbingan, asuhan, serta kegiatan mengajar yang mampu menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak anak,. Semua itu bertujuan untuk memberikan stimulasi yang membantu perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Pada pasal 1 ayat 14 di tegaskan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah Upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak usia lahir hingga enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesadaran dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut . menurut ardy (2020) mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan spiritual, sosial emosional (sikap dan perilaku serta beragam), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap – tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum (Rusmono, 2020). Pola pendidikan seperti ini disebut pendidikan inklusi (Wati, 2014). Inklusi dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menjawab dan merespon keragaman di antara semua individu melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat dan mengurangi eksklusi baik dalam maupun dari kegiatan pendidikan (Wathoni, 2013). Inklusi merupakan suatu sistem yang hanya dapat diterapkan ketika semua warga sekolah memahami dan mengadopsinya. Pendidikan inklusif berkenaan dengan memberikan respon yang sesuai kepada spektrum Edukatif yang luas dari kebutuhan belajar baik dalam setting pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keragaman siswa. Pendidikan inklusif bertujuan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari pada suatu problem (Sastradiharja et al., 2020).

pendidikan inklusi dibangun di atas keyakinan bahwa keragaman adalah kekuatan. Kehadiran ABK dalam lingkungan belajar reguler tidak hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi secara optimal, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar bagi anak-anak non-ABK. Anak-anak belajar menerima perbedaan, mengembangkan empati, dan membangun sikap saling menghargai. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menegaskan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun harus dihapuskan, termasuk dalam akses pendidikan Dewi.(2020)

Sekolah inklusi merupakan sarana yang ditujukan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat belajar dikelas layaknya anak anak pada umumnya. Peserta didik dalam pendidikan inklusi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009) menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau

pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya Arum et al. (2020).

Fenomena sekolah inklusi di Indonesia menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satu contoh nyata dari implementasi pendidikan inklusif ini dapat dilihat di SDN 2 Bengkala, sebuah sekolah dasar yang berlokasi di Buleleng, Bali. Sekolah ini telah lama menjadi pionir dalam pendidikan inklusif, secara aktif mengintegrasikan siswa-siswa tunarungu yang dikenal sebagai sejak tahun 2007. Pendekatan pengajaran di SDN 2 Bengkala sangatlah adaptif dan inovatif. Di dalam kelas, proses pembelajaran melibatkan dua guru secara bersamaan. Satu guru bertugas menggunakan bahasa isyarat, memastikan bahwa materi pelajaran tersampaikan dengan jelas kepada siswa-siswa tunarungu. Sementara itu, guru lainnya menyampaikan materi pelajaran secara verbal untuk seluruh siswa lainnya. Metode ini tidak hanya memastikan bahwa siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tetapi juga mendorong siswa-siswa untuk terpapar dan belajar bahasa isyarat. Interaksi ini pada akhirnya memupuk komunikasi yang efektif dan empati di antara seluruh siswa, menciptakan komunitas belajar yang inklusif dan saling mendukung. SDN 2 Bengkala memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Penggunaan tablet menjadi salah satu fitur kunci dalam kurikulum mereka, memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber daya daring yang mendukung pembelajaran bahasa isyarat. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengatasi hambatan komunikasi dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal dan mendalam bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tentu untuk mengalami permasalahan yang dapat menghambat proses penyelenggaraan pendidikan inklusi, seperti di kemukaan oleh Mudjito & dkk, (2012) bahwa ada beberapa permasalahan dan persoalan dalam pendidikan inklusi, antara lain; Faktor internal menurut Mudjito, (2012) 1. Ketidakmampuan institusi pendidikan untuk beradaptasi pada dasarnya 2. Berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar yang tidak mencukupi 3. Terbatasnya guru pembimbing khusus (GPK). Sedangkan Faktor eksternal menurut Mudjito (2012): 1. Kekurangan dalam akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus. 2. Rendahnya partisipasi dari komunitas sekolah dan masyarakat dalam mendukung pendidikan mereka.

Dalam penelitian dewi, (2023) dalam artikelnya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini menemukan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia masih mengalami hambatan, utamanya terkait kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta sikap guru yang masih memandang sebelah mata terhadap ABK. Anggita, (2020) dalam Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia, yang menyatakan bahwa praktik sistem pendidikan inklusif pada tingkatan PAUD masih menyisakan persoalan, yakni pelaksanaan yang belum sepenuhnya inklusif, serta permasalahan pada tenaga pendidik, sarana prasarana pendukung, dan kurikulum yang belum mumpuni. Fitrah, Warman, & Komariyah, (2024) dalam Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya juga membahas secara spesifik hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, meskipun konteksnya di tingkat SMP. Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini menyuarakan urgensi peningkatan kualitas dan pembenahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru dan penyediaan fasilitas yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan sekolah inklusi pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dengan memahami hambatan-hambatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas adaptif, pengembangan kurikulum fleksibel, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menggarisbawahi urgensi peningkatan kualitas dan pembenahan menyeluruh dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, sehingga setiap anak, tanpa memandang kondisi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif

METODE

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah studi Pustaka. Studi pustaka sendiri menurut Sugiyono (2016:291), berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak pernah lepas dari literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi Pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik dengan membaca, mempelajari dan review sekunder dari jurnal, artikel, serta buku terkait dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diperoleh dari membaca, mempelajari, dan review jurnal, artikel dan buku terkait dengan faktor penghambat dalam menyelenggarakan sekolah inklusi di lembaga PAUD Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi. Di Tingkat Lembaga PAUD adalah factor penghambat.

Ada beberapa faktor penghambat dalam menyelenggarakan sekolah inklusi di Lembaga PAUD.

TABEL 1. *Faktor penghambat sekolah inklusi*

NO	Factor penghambat
1	Ketidakmampuan institusi Pendidikan untuk beradaptasi pada dasarnya
2	Berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar yang tidak mencukupi
3	Terbatasnya guru pembimbing khusus (GPK)
4	Kekurangan dalam akses bagi dengan kebutuhan khusus
5	Rendahnya partisipasi dalam komunitas sekolah dengan Masyarakat

Berdasarkan factor penghambat tersebut sangat mempengaruhi penyelenggaraan sekolah inklusi. Adapun pengaruh factor tersebut dalam menyelenggarakan sekolah inklusi di uraikan sebagai berikut :

Ketidak mampuan institusi Pendidikan untuk beradaptasi pada dasarnya.

Adaptasi ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari kulum, cara mengajar, hingga system penilaian, masih banyak Lembaga PAUD yang menerapkan pendekatan “satu untuk semua” dalam proses belajar, yang tidak memenuhi cara belajar dan berkebutuhan khusus anak-anak dengan stabilitas. sering kali menjadi hambatan, karena tidak dibuat untuk membeikan kebebasan bagi modifikasi untuk menyeduaikan yang diperlukan. Misalnya, kegiatan belajar belajar yang terlalu fokus pada kemampuan motorik halus tertentu bisa menjadi kesulitan berat bagi anak-anak dengan disabilitas motorik. Selain itu, keterbatasan dalam merancang program pembelajaran individual (PPI) yang sesuai dengan karakteristik setiap anak berkebutuhan khusus juga menjadi kendala. PPI adalah inti dari pendidikan inklusi, karena memungkinkan guru untuk menciptakan intervensi yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing anak. Tanpa adanya kemampuan adaptasi dasar ini, sekolah inklusi hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna, di mana anak-anak berkebutuhan khusus tetap terpinggirkan dalam lingkungan yang seharusnya menerima mereka.

Berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar yang tidak mencukupi.

Pendidikan inklusi memerlukan rasio antara guru dan murid yang lebih kecil, terutama saat ada anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih. Di banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah guru yang ada tidak sebanding dengan beban kerja serta keragaman kebutuhan para siswa. Hal ini membuat para guru merasa terbebani dan sulit untuk memberikan dukungan yang cukup kepada masing-masing siswa. Setiap anak, terutama yang merupakan anak berkebutuhan khusus, memerlukan interaksi pribadi dan bimbingan yang lebih mendalam. Ketika satu guru harus mengurus terlalu banyak siswa, otomatis kualitas interaksi tersebut akan menurun. Situasi ini mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan anak, kegagalan dalam mengidentifikasi masalah sejak awal, dan kurangnya intervensi yang tepat waktu. Pada akhirnya, kondisi ini bisa menghalangi kemajuan akademis dan sosial anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan bisa membuat mereka merasa tidak nyaman atau kurang mendapatkan perhatian yang layak di sekolah.

Terbatasnya guru pembimbing khusus (GPK)

Keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK) adalah permasalahan penting dalam konteks pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif. GPK berperan sebagai fondasi dalam pendidikan inklusi, karena mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani anak-anak dengan berbagai disabilitas. Peran mereka mencakup memberikan konsultasi kepada guru kelas, merancang metode pembelajaran yang disesuaikan, serta memberikan dukungan langsung kepada siswa berkebutuhan khusus. Namun, jumlah GPK, khususnya yang terlatih untuk anak usia dini, masih sangat sedikit. Bahkan jika dan, jumlah mereka sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua lembaga PAUD yang menerapkan atau berencana untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kekurangan ini mengakibatkan guru kelas terpaksa menangani anak-anak berkebutuhan khusus tanpa adanya dukungan yang memadai dari para ahli. Mereka mungkin kekurangan pengetahuan tentang cara menyesuaikan kurikulum, mengatasi perilaku tertentu, atau menggunakan alat bantu yang tepat. Sebagai akibatnya, kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus menjadi terhambat, dan potensi mereka tidak dapat berkembang secara maksimal.

Kekurangan dalam akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus

Kekurangan dalam akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus tidak hanya terbatas pada akses fisik, tetapi juga akses terhadap materi pembelajaran dan fasilitas pendukung. Meskipun gedung sekolah mungkin terlihat ramah disabilitas, seringkali ada detail-detail kecil yang terlewatkan, seperti toilet yang tidak mudah dijangkau, pintu yang terlalu sempit untuk kursi roda, atau jalur yang tidak rata. Lebih dari itu, akses terhadap materi pembelajaran yang disesuaikan juga sering menjadi masalah. Anak-anak dengan disabilitas visual mungkin memerlukan buku braille atau materi audio, sementara anak-anak dengan disabilitas pendengaran memerlukan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Keterbatasan dana dan pengetahuan seringkali menghambat penyediaan fasilitas dan materi ini. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi adaptif, seperti perangkat lunak pembaca layar atau papan komunikasi alternatif, juga menjadi penghambat. Akses yang terbatas ini secara langsung membatasi partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mengajar dan interaksi sosial dengan teman-temannya.

Rendahnya partisipasi dari komunitas sekolah dan Masyarakat dalam mendukung Pendidikan

Rendahnya keterlibatan dari komunitas sekolah serta masyarakat dalam mendukung pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusi bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak guru atau sekolah, melainkan juga memerlukan dukungan dari semua elemen ekosistem pendidikan, termasuk orang tua, komunitas setempat, dan pihak pemerintah. Banyak orang tua yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua bisa menghalangi pengenalan dini terhadap kebutuhan anak, perencanaan intervensi yang tepat, dan kelangsungan dukungandi rumah. Selain itu, stigma serta kesalahpahaman Masyarakat mengenai disabilitas juga penghalang. Minimnya pemahaman atas potensi anak dengan kebutuhan khusus bisa berujung pada diskriminasi, pengucilan, dan kurangnya dukungan sosial. Apabila masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi konsep inklusi, upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas akan sulit dilakukan secara optimal. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang solid, pengalokasian dana yang cukup, serta program pelatihan yang berkelanjutan juga sangat penting demi memastikan kelangsungan pendidikan inklusi.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat ini saling terkait dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Ketidakmampuan institusi untuk beradaptasi diperparah oleh kurangnya tenaga pendidik dan GPK, yang pada gilirannya berdampak pada minimnya akses dan rendahnya partisipasi komunitas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik dan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas yang adaptif, pengembangan kurikulum yang fleksibel, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah penting menuju terwujudnya pendidikan inklusi yang sejati di lembaga PAUD. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara sistematis, kita dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terungkap bahwa ada lima faktor utama yang menghambat penyelenggaraan sekolah inklusi di tingkat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi, dan saling berhubungan membentuk tantangan yang kompleks.

Ketidakmampuan institusi Pendidikan untuk beradaptasi pada dasarnya

Hasil studi menunjukkan bahwa ketidakmampuan lembaga pendidikan untuk beradaptasi adalah penghalang utama dalam pelaksanaan sekolah inklusi di PAUD. Upaya adaptasi tersebut mencakup kurikulum, teknik pengajaran, dan sistem evaluasi. Banyak lembaga PAUD yang masih menggunakan pendekatan "sama untuk semua" yang tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar serta kestabilan anak-anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang ada sering kali kaku dan tidak memberikan kesempatan untuk perubahan yang diperlukan. Sebagai contoh, kegiatan belajar yang terlalu menekankan pada kemampuan motorik halus tertentu dapat menjadi tantangan besar bagi anak-anak dengan disabilitas motorik. Selain itu, kesulitan dalam merancang Program Pembelajaran Individual (PPI) yang sesuai dengan karakteristik masing-masing Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga menjadi hambatan utama. PPI adalah inti dari pendidikan inklusi karena memungkinkan guru untuk merancang intervensi yang sesuai dengan kelebihan dan kekurangan setiap anak. Tanpa kemampuan adaptasi ini, sekolah inklusi hanya akan menjadi istilah yang kosong, di mana anak-anak berkebutuhan khusus tetap dikesampingkan. Temuan ini selaras dengan penelitian Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum, Warman, dan Laili Komariyah (2024) yang membahas hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, meskipun dalam konteks SMP, yang menunjukkan bahwa adaptasi kurikulum dan program pembelajaran menjadi krusial. Meskipun fokusnya berbeda, esensi masalah adaptasi institusi tetap relevan. Studi ini menegaskan bahwa fleksibilitas kurikulum dan kemampuan institusi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan beragam siswa adalah prasyarat penting untuk pendidikan inklusif yang berhasil.

Berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar yang tidak mencukupi.

Kurangnya jumlah tenaga pengajar yang memadai. Pendidikan inklusi memerlukan rasio guru dan murid yang lebih kecil, terutama saat ada anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih. Di banyak Lembaga PAUD, jumlah guru yang ada tidak sebanding dengan beban kerja serta keragaman kebutuhan para siswa. Hal ini menyebabkan para guru merasa terbebani dan sulit untuk memberikan dukungan yang cukup kepada masing-masing siswa. Setiap anak, terutama ABK, memerlukan interaksi pribadi dan bimbingan yang lebih mendalam. Ketika satu guru harus mengurus terlalu banyak siswa, kualitas interaksi tersebut akan menurun. Situasi ini mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan anak, kegagalan dalam mengidentifikasi masalah sejak awal, dan kurangnya intervensi yang tepat waktu. Pada akhirnya, kondisi ini bisa menghalangi kemajuan akademis dan sosial anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan bisa membuat mereka merasa tidak nyaman atau kurang mendapatkan perhatian yang layak di sekolah. Penelitian ini berkaitan dengan teori Muttaqien (2023) dalam artikelnya "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini" juga menemukan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia masih mengalami hambatan, utamanya terkait kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)¹⁹. Meskipun tidak secara spesifik membahas jumlah guru, kurangnya keterampilan guru dapat dihubungkan dengan beban kerja yang tinggi akibat rasio guru-murid yang tidak ideal. Apabila jumlah guru kurang, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru juga akan terhambat, sehingga masalah kurangnya

keterampilan guru semakin parah.

Keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK)

Kekurangan Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi masalah penting dalam konteks PAUD yang inklusif. GPK memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan inklusi karena mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menangani anak-anak dengan berbagai jenis disabilitas. Tugas mereka mencakup memberikan saran kepada guru kelas, merancang metode pengajaran yang sesuai, serta memberikan bantuan langsung kepada siswa yang membutuhkan. Namun, jumlah GPK, terutama yang terlatih untuk anak usia dini, masih sangat terbatas. Bahkan jika ada, jumlah mereka sering tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan Lembaga PAUD yang menerapkan atau berencana melaksanakan pendidikan inklusi. Kekurangan ini menyebabkan guru kelas harus mengelola siswa berkebutuhan khusus tanpa dukungan yang cukup dari para profesional. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menyesuaikan kurikulum, menangani perilaku tertentu, atau menggunakan alat bantu yang sesuai. Akibatnya, kualitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus menjadi terhambat, dan potensi mereka tidak dapat berkembang dengan baik. Hasil ini diperkuat oleh temuan Mudjito (2012) yang menyebutkan terbatasnya guru pembimbing khusus (GPK) sebagai salah satu faktor internal permasalahan dalam pendidikan inklusi. Sakti (2020) dalam "Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia" juga menyoroti permasalahan pada tenaga pendidik sebagai salah satu isu utama dalam praktik sistem pendidikan inklusif pada tingkatan PAUD yang belum sepenuhnya inklusif. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan GPK menjadi hambatan serius yang perlu segera diatasi.

Kurangnya dalam akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus,

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya akses bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus menjadi suatu penghalang. Keterbatasan akses ini meliputi bukan hanya akses fisik, tetapi juga akses terhadap bahan ajar dan fasilitas penunjang. Meskipun bangunan sekolah mungkin tampak inklusif bagi penyandang disabilitas, sering kali ada rincian kecil yang terlewat, seperti toilet yang sulit dijangkau, pintu yang sempit untuk kursi roda, atau permukaan jalur yang tidak rata. Di samping itu, akses menuju materi pembelajaran yang disesuaikan juga sering jadi masalah. Anak-anak yang mengalami disabilitas penglihatan mungkin memerlukan buku braille atau materi dalam format audio, sementara anak-anak yang memiliki disabilitas pendengaran membutuhkan penggunaan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Keterbatasan dalam hal dana dan pengetahuan sering kali menjadi halangan bagi penyediaan fasilitas dan bahan tersebut. Selain itu, minimnya akses terhadap teknologi adaptif, seperti perangkat lunak pembaca layar atau alat komunikasi alternatif, juga merupakan penghambat. Keterbatasan akses ini secara langsung menghalangi partisipasi aktif anak-anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar dan interaksi sosial dengan teman sebayanya. Aspek ini sejalan dengan faktor eksternal yang diungkapkan oleh Mudjito (2012) yaitu kekurangan dalam akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Meskipun SDN 2 Bengkala, Buleleng, Bali, merupakan contoh positif implementasi pendidikan inklusif yang memanfaatkan teknologi modern seperti tablet untuk mendukung pembelajaran bahasa isyarat bagi siswa tunarungu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus seperti SDN 2 Bengkala masih belum merata di seluruh Lembaga PAUD di Indonesia. Idealnya, setiap Lembaga PAUD inklusif harus mampu menyediakan akses fisik dan materi yang setara seperti yang dipraktikkan di SDN 2 Bengkala.

Rendahnya partisipasi dari komunitas sekolah dan Masyarakat dalam mendukung Pendidikan.

Rendahnya partisipasi komunitas sekolah dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusi bukan hanya tugas guru atau sekolah, melainkan juga memerlukan dukungan dari semua elemen dalam ekosistem pendidikan, termasuk orang tua, komunitas lokal, dan pemerintah. Banyak orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus merasa tidak terlibat secara maksimal dalam proses pendidikan anak mereka. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat menghambat identifikasi awal terhadap kebutuhan anak, perencanaan intervensi yang tepat, dan kelanjutan dukungan di rumah. Selain itu, stigma dan kesalahpahaman masyarakat tentang disabilitas juga menjadi penghalang. Minimnya pemahaman tentang potensi anak dengan kebutuhan khusus dapat berujung pada diskriminasi, pengucilan, dan kurangnya dukungan sosial. Jika masyarakat belum sepenuhnya menerima konsep inklusi, maka usaha sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas akan sulit dijalankan secara optimal. Dukungan dari pemerintah berupa kebijakan yang kuat, pengalokasian dana yang memadai, serta program pelatihan yang berkesinambungan juga sangat penting untuk memastikan keberlangsungan Pendidikan inklusi. Penelitian ini berkaitan dengan teori Mudjito (2012) sebagai faktor eksternal, yaitu rendahnya partisipasi dari komunitas sekolah dan masyarakat dalam mendukung pendidikan mereka. Ketiga penelitian yang dirujuk sebelumnya (anggita, 2020) dewi, (2023) (Fitrah, Warman, & Komariyah, 2024) secara keseluruhan menyuarakan urgensi peningkatan kualitas dan pembenahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru dan penyediaan fasilitas yang memadai. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif penting mengenai peran komunitas dan masyarakat yang seringkali terabaikan. Tanpa dukungan holistik dari seluruh pemangku kepentingan, keberhasilan pendidikan inklusif akan sulit dicapai.

Secara keseluruhan, berbagai faktor yang menghalangi ini saling berhubungan dan menciptakan siklus buruk yang sulit diatasi. Ketidakmampuan lembaga untuk beradaptasi dipeburuk oleh kurangnya tenaga pengajar dan guru pendamping, yang selanjutnya mempengaruhi rendahnya akses dan partisipasi masyarakat. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan. Peningkatan keterampilan guru, penyediaan fasilitas yang responsif, pengembangan kurikulum yang dapat disesuaikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah-langkah penting menuju tercapainya pendidikan inklusi yang sejati di lembaga PAUD. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara terstruktur, kita dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sekolah inklusi di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih menghadapi lima faktor pendorong utama yang saling berkaitan dan mengakibatkan tantangan yang rumit. Faktor-faktor tersebut mencakup: ketidakmampuan lembaga pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum, metode pengajaran, serta sistem evaluasi yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) kurangnya jumlah tenaga pengajar, yang mengakibatkan beban kerja guru menjadi berat dan perhatian yang minim terhadap siswa, terutama ABK; serta terbatasnya guru pembimbing khusus

(GPK) yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan keahlian untuk menghadapi berbagai masalah disabilitas. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus, baik dari segi fisik maupun akses terhadap bahan pembelajaran dan fasilitas pendukung seperti buku braille, bahasa isyarat, atau teknologi yang dapat disesuaikan. Selain itu, rendahnya partisipasi dari komunitas sekolah dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif juga menjadi suatu kendala, yang sering kali muncul akibat kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta adanya stigma dan kesalahpahaman masyarakat mengenai disabilitas. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi yang mencakup peningkatan kapasitas para guru, penyediaan fasilitas yang dapat disesuaikan, pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, dan peningkatan kesadaran dalam masyarakat. Dengan menangani hambatan-hambatan ini secara terencana, diharapkan setiap anak, tanpa memandang kondisi mereka, bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan belajar yang mendukung serta inklusif di lembaga PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak PAUD Inklusi. *Al Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(01), 36–47.
- Anggita, S. S. (2020). implementasi pendidikan iklusif pada lembaga pendidikan anak usia dini di indonesia. *jurnal goden age, universitas hamzahwadi* 288-249.
- Ardy, N. W. (2020). *dasar dasar manajemen paud* . Yogyakarta: Arruza Media.
- Bahri, S. (2022). manajemen pendidikan sekolah inklusi . *jurnal ilmu pendidikan* , 94-100.
- Dewi, K. C., & Lestari, P. A. (2019). Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Sekolah Inklusi Pada jenjang PAUD di Kabupaten Malang. *Ilmiah Pendidikan Guru PAUD*, 112-125.
- Dewi, M. M. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Of Disability Studies And Research* , 12-23.
- Dewi, S. (2020). Implementasi Kurikulum Inklusi Pada Lembaga PAUD di Kota Bandung. *Pendidikan Anak Usia Dini*, 45 -58.
- Fitrah, k. U., Warman, & Komariyah, L. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di . *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial (JMPIS)*, 127-137.
- Anwar, R. N., & Zaenullah. (2020). Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Care*, 8(1), 56–66.
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Kelola. Manajemen pendidikan* , 209-2017.
- Sari, A., & Handayani, P. (2020). Kesiapan Guru PAUD dalam implementasi pendidikan inklusi. *pendidikan anak usia dini*, 45-46.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian, kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sastradiharja, E. J., MS, F., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. *Alim Journal of Islamic* 1–11
- Wathoni, K. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam. . *Ta'allum: Jurnal Pendidikan* , 99-109.
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah* , 398-378.